

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di balik niat baik program pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen strategis perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terdapat dinamika kekuasaan yang kompleks antara korporasi, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar aktivitas filantropis menuju instrumen strategis pembangunan sosial. Menurut M. Porter & Kramer (2011), CSR tidak lagi dipandang sebagai biaya atau tindakan amal, melainkan sebagai investasi sosial yang memiliki potensi menciptakan nilai bersama (*shared value*) antara korporasi dan komunitas lokal.

Di Indonesia, regulasi tentang CSR telah mengalami perkembangan kompleks. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas secara eksplisit mengamanatkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kerangka regulasi ini membentuk lanskap institusional di mana relasi kuasa antara korporasi dan komunitas lokal terstruktur dan dinegosiasikan (Rosyida & Suryawati, 2018).

Pasca diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2007, praktik CSR di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari sekadar aktivitas filantropi menjadi kewajiban hukum yang lebih terstruktur. Waagstein (2011)

mengidentifikasi bahwa regulasi ini menciptakan perdebatan intensif di kalangan pelaku bisnis, dengan beberapa perusahaan melihatnya sebagai beban tambahan sementara yang lain menjadikannya momentum untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Cahyandito, 2012 mencatat bahwa implementasi CSR pasca regulasi tersebut menunjukkan peningkatan alokasi anggaran meskipun masih terdapat variasi dalam pendekatan pelaksanaannya.

Frynas (2009) menjelaskan bahwa meskipun keberadaan regulasi formal telah mendorong peningkatan kuantitas program CSR, tantangan implementasi masih tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Sementara itu, Prayogo dan Hilarius (2012) dalam studi empirisnya di sektor pertambangan menemukan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam pelaksanaan CSR pasca regulasi, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi program di lapangan.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa telah mengalami transformasi signifikan dengan munculnya program CSR yang semakin kompleks dan strategis. Studi empiris yang dilakukan oleh Welker (2014) di Indonesia menunjukkan bahwa program CSR dapat menjadi instrumen bagi perusahaan untuk membangun legitimasi sosial, mengamankan kepentingan bisnisnya, dan mempengaruhi dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Melalui berbagai inisiatif pemberdayaan

masyarakat, perusahaan dapat mempengaruhi struktur kekuasaan di desa dan membentuk relasi patronase dengan elit-elit lokal.

Konstelasi kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR menciptakan arena negosiasi baru antara pemerintah desa, korporasi, dan komunitas lokal. Pendekatan teoritis Foucault tentang relasi kuasa memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami fenomena ini. Kekuasaan tidak lagi dipahami secara vertikal, melainkan tersebar dan diproduksi melalui jejaring relasi sosial (Ritzer, 2012). Sejalan dengan ini, penelitian Maconachie (2014) mengungkapkan bahwa implementasi CSR di tingkat lokal seringkali melibatkan negosiasi dan kontestasi kepentingan antara perusahaan, pemerintah lokal, dan masyarakat.

Giddens (2004) dalam teori strukturasinya menjelaskan bahwa struktur sosial dan kekuasaan terbentuk melalui praktik sosial yang berulang dan saling terkait. Dalam konteks CSR, program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi medium bagi perusahaan untuk membentuk relasi kuasa dengan pemerintah desa dan masyarakat lokal. Rajak (2011) dalam studinya mengungkapkan bagaimana program CSR berkontribusi pada produksi dan reproduksi struktur sosial di tingkat lokal, membentuk pola-pola kekuasaan yang kompleks antara korporasi dan komunitas.

Studi-studi terdahulu tentang CSR di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana program CSR membentuk struktur kekuasaan di tingkat desa. Dari 180 artikel yang dianalisis (Moon et al., 2018) hanya 8% yang membahas

dinamika kekuasaan di tingkat desa, dan tidak satupun yang secara khusus menganalisis dalam konteks implementasi program CSR di Indonesia pasca Undang-Undang Desa. Kesenjangan ini menjadi semakin relevan mengingat transformasi fundamental dalam tata kelola desa yang terjadi setelah implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Dimensi institusional dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat mendapat elaborasi mendalam melalui studi (Moon et al., 2018) berjudul "*Historical Perspectives on Corporate Social Responsibility*". Penelitian komparatif yang melibatkan analisis 180 program CSR di enam negara Asia selama periode lima tahun ini mengungkap bagaimana konteks sosio-politik lokal mempengaruhi implementasi dan efektivitas program CSR. Dengan menggunakan pendekatan *institutional ethnography* dan *process tracing* yang melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen program, observasi partisipatif, dan wawancara dengan 250 informan kunci, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan program CSR sangat bergantung pada kematangan institusi lokal (*institutional maturity index* $r=0.82$) dan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder coordination index* $r=0.75$).

Pemahaman tentang dinamika pemberdayaan masyarakat dalam konteks CSR semakin diperkaya melalui studi longitudinal N. Banks et al., (2015) berjudul "*NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close for Comfort?*" yang dilakukan selama sepuluh tahun di lima negara berkembang. Dengan menganalisis 200 program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

pemerintah lokal, perusahaan, dan LSM, penelitian ini mengungkap kompleksitas hubungan antar aktor dalam implementasi program pemberdayaan. Melalui kombinasi metode *etnografi institusional*, *social network analysis*, dan *participatory impact assessment* yang melibatkan lebih dari 2.000 responden, mereka mengidentifikasi empat pola hubungan yang dominan: *cooperation* yang ditandai dengan kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan, *competition* yang mencerminkan persaingan dalam mengakses sumber daya, *cooptation* di mana program diambil alih oleh kepentingan tertentu, dan *confrontation* yang menunjukkan konflik kepentingan.

Dinamika strukturisasi kekuasaan dalam implementasi CSR semakin kompleks dengan hadirnya peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) sebagai institusi yang mengintegrasikan program CSR dengan perencanaan pembangunan daerah. Studi Handayani (2019) mengungkapkan peran krusial Bapperida Kabupaten Klaten dalam menciptakan kerangka koordinasi antara program CSR dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap 45 program CSR di Kabupaten Klaten, penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa program yang terkoordinasi dengan Bapperida memiliki tingkat keberhasilan 65% lebih tinggi dalam mencapai target pemberdayaan masyarakat.

Widodo (2021) lebih lanjut mengungkapkan bahwa koordinasi *multi-level* antara Bappedalitbang, pemerintah desa, dan korporat menciptakan dinamika kekuasaan yang kompleks. Melalui studi *etnografi*

institutional di tiga kecamatan di Kabupaten Klaten, penelitian tersebut menemukan bahwa Bapperida tidak hanya berperan sebagai koordinator, tetapi juga menjadi arena negosiasi kepentingan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan korporat. Temuan ini memperkuat argumentasi tentang bagaimana struktur kekuasaan dalam implementasi CSR terbentuk melalui interaksi *multi-level governance*.

Penelitian komparatif yang dilakukan oleh Antlöv et al., (2016) di berbagai daerah di Indonesia mengungkapkan bahwa pola relasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan korporat dalam implementasi CSR mencerminkan apa yang disebut sebagai "*nested power structure*" atau struktur kekuasaan berlapis. Dalam struktur ini, setiap level pemerintahan memiliki kepentingan dan strategi negosiasi tersendiri, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana program CSR diimplementasikan di tingkat desa.

Konsep CSR memiliki akar historis yang panjang sebelum berkembang menjadi praktik yang kompleks seperti saat ini. Pada awalnya, praktik yang menyerupai CSR muncul dalam bentuk filantropi bisnis sederhana (Bowen, 1953), dipandang sebagai perintis dalam konseptualisasi modern CSR melalui bukunya "*Social Responsibilities of the Businessman*", di mana ia menyoroti kewajiban pengusaha untuk mengikuti kebijakan dan membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. (Carroll, 1991) kemudian mengembangkan kerangka konseptual yang membagi tanggung jawab perusahaan menjadi

empat kategori: ekonomi, hukum, etika, dan diskresi (filantropi), yang menjadi landasan teoretis bagi perkembangan CSR selanjutnya.

Di Indonesia, praktik CSR awalnya dipengaruhi kuat oleh tradisi keagamaan dan komunal. Baskin (2014) dalam studinya tentang CSR di pasar negara berkembang mengidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia sebelum era 2000-an umumnya menjalankan program sosial yang berfokus pada bantuan infrastruktur dan aktivitas keagamaan, tanpa visi strategis jangka panjang. Perkembangan signifikan terjadi pasca reformasi, di mana menurut Rosser & Edwin (2010) tekanan masyarakat sipil dan perubahan lanskap politik mendorong transformasi praktik CSR menjadi lebih terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan.

Dalam konteks Kabupaten Klaten, relasi antara Bappedalitbang, pemerintah desa, dan PT Tirta Investama mencerminkan kompleksitas strukturisasi kekuasaan dalam implementasi CSR. Susilowati et al. (2022) mengungkapkan temuan kritis bahwa meskipun program CSR telah memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar, program tersebut seringkali gagal membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan perspektif Hikey & Mohan (2004) tentang pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya transformasi struktural, bukan sekadar intervensi temporer.

Studi kasus di Desa Juwiring, Kabupaten Klaten menjadi fokus penelitian ini karena menawarkan konteks yang unik untuk menganalisis

strukturisasi kekuasaan dan negosiasi dalam implementasi CSR. PT Tirta Investama (Aqua) Klaten, sebagai satu-satunya perusahaan kandidat PROPER Emas di wilayah tersebut pada tahun 2023, telah menerapkan berbagai program CSR inovatif. Konteks ini menawarkan ruang analisis menarik terkait bagaimana program CSR membentuk struktur kekuasaan dan bagaimana desa melakukan negosiasi dalam struktur tersebut.

Berdasarkan pra-riset yang dilakukan pada periode Maret-April 2024 dan Oktober 2024 di Desa Juwiring, ditemukan berbagai fenomena yang mengindikasikan kompleksitas strukturisasi kekuasaan dan proses negosiasi dalam implementasi CSR. Pertama, dalam aspek perencanaan pembangunan, PT Tirta Investama tidak hanya berperan sebagai pemangku kepentingan eksternal, tetapi telah menjadi aktor strategis dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Keterlibatan ini mencerminkan bagaimana program CSR berkontribusi pada pembentukan struktur kekuasaan di tingkat desa.

Kedua, terdapat transformasi signifikan dalam pola relasi antara pemerintah desa dan korporasi yang terlihat dari meningkatnya intensitas keterlibatan korporat dalam kegiatan desa. Sepanjang tahun 2020-2023, tercatat setidaknya 15 kegiatan desa yang melibatkan partisipasi aktif Yayasan Gita Pertiwi dan PT Tirta Investama, mulai dari perayaan hari besar nasional hingga forum-forum pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan ini tidak terbatas pada dukungan pendanaan, tetapi mencakup aspek perencanaan program, implementasi, hingga evaluasi, menunjukkan

bagaimana korporasi membangun dan mempertahankan posisi kuasanya dalam struktur sosial desa.

Ketiga, fenomena yang paling mencolok adalah munculnya mekanisme koordinasi informal yang intensif antara pemerintah desa dan korporasi. Selama periode pra riset, teridentifikasi adanya pertemuan rutin antara tim CSR PT. Tirta Investama dengan perangkat desa yang membahas berbagai aspek program pemberdayaan. Lebih dari itu, terbentuk grup *WhatsApp* khusus yang beranggotakan perwakilan desa, korporat, dan tokoh masyarakat sebagai sarana koordinasi cepat. Pola komunikasi intensif ini mencerminkan proses negosiasi yang berkelanjutan dalam struktur kekuasaan yang ada.

Keempat, koordinasi *multi-level* antara Bapperida Kabupaten Klaten, pemerintah Desa Juwiring, dan PT Tirta Investama menciptakan dinamika tersendiri dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Data pra-riset menunjukkan bahwa selama periode 2020-2023, terdapat pertemuan koordinasi formal dan informal yang melibatkan ketiga institusi tersebut. Forum-forum koordinasi ini tidak hanya menjadi sarana sinkronisasi program, tetapi juga arena di mana kepentingan dan kekuasaan dinegosiasikan. Pola koordinasi ini mencerminkan bagaimana struktur kekuasaan dalam implementasi CSR terbentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi *multi-level governance*.

Penelitian tentang strukturisasi kekuasaan dan negosiasi desa dalam konteks CSR ini memberikan kontribusi signifikan dalam tiga

aspek. Pertama, mengisi kesenjangan teoretis dalam pemahaman tentang bagaimana program CSR membentuk dan dibentuk oleh struktur kekuasaan di tingkat desa. Kedua, memberikan pemahaman empiris tentang mekanisme negosiasi yang dilakukan desa dalam menghadapi struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR. Ketiga, menyumbangkan perspektif baru dalam diskursus tentang tata kelola CSR di era desentralisasi, khususnya terkait dengan dinamika kekuasaan dan kapasitas negosiasi desa.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* (CSR) membentuk struktur dan interelasi kekuasaan di Desa?
2. Bagaimana desa melakukan negosiasi dalam struktur dan interelasi kekuasaan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pembentukan struktur dan interelasi kekuasaan yang terjadi melalui program (CSR) di Desa Juwiring.
2. Menganalisis proses negosiasi yang dilakukan desa dalam struktur dan interelasi kekuasaan yang terbentuk melalui program (CSR) di Desa Juwiring.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Konsep Strukturisasi Kekuasaan

Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang strukturisasi kekuasaan dengan menganalisis bagaimana program CSR membentuk struktur dan interelasi kekuasaan di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori strukturisasi dalam konteks pemerintahan desa.

2. Pengembangan Konsep Negosiasi dalam Relasi Kekuasaan

Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang proses negosiasi yang dilakukan desa dalam menghadapi struktur dan interelasi kekuasaan yang terbentuk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori negosiasi dan relasi kekuasaan dalam konteks pemerintahan desa.

3. Kontribusi terhadap Teori CSR dan Dinamika Kekuasaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran CSR dalam membentuk dinamika kekuasaan di tingkat desa, serta bagaimana desa melakukan negosiasi dalam dinamika tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan Wawasan bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam memahami dan menyikapi struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR, serta mengembangkan strategi negosiasi yang efektif.

2. Panduan bagi Perusahaan yang Melaksanakan CSR

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program CSR di tingkat desa mengenai pentingnya mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan proses negosiasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

3. Memberikan Informasi untuk Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana memahami dan mengelola struktur kekuasaan serta proses negosiasi dalam program CSR untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.

1.5. *Literature Review*

Diskursus akademik mengenai strukturisasi kekuasaan dan negosiasi dalam konteks CSR telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kajian-kajian yang relevan mencakup berbagai dimensi teoretis dan empiris yang penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan negosiasi di tingkat desa.

Dimensi institusional dalam implementasi program CSR mendapat elaborasi mendalam melalui studi Moon et al. (2018) berjudul "*Historical Perspectives on Corporate Social Responsibility*". Penelitian komparatif ini melibatkan analisis 180 program CSR di enam negara Asia selama periode lima tahun. Dengan menggunakan pendekatan institutional ethnography dan process tracing, melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen program, observasi partisipatif, dan wawancara dengan 250

informan kunci, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan program CSR sangat bergantung pada kematangan institusi lokal (*institutional maturity index* $r=0.82$) dan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder coordination index* $r=0.75$). Studi ini relevan dengan penelitian saat ini karena memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana struktur institusional mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam implementasi CSR.

Welker (2014) dalam "*Enacting the Corporation: An American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia*" melakukan studi etnografi selama 15 bulan di lokasi pertambangan di Indonesia. Metodologi penelitian mencakup observasi partisipan, wawancara mendalam dengan 120 informan dari berbagai lapisan masyarakat, dan analisis dokumen perusahaan. Temuannya mengungkap bagaimana program CSR menjadi instrumen perusahaan untuk membangun legitimasi sosial dan mempengaruhi struktur kekuasaan lokal, dengan mengidentifikasi tiga mekanisme utama: pembentukan elite patron, transformasi institusi lokal, dan rekonfigurasi relasi sosial. Penelitian ini sangat relevan karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana CSR beroperasi sebagai instrumen kekuasaan dalam konteks Indonesia.

Li (2007) dalam (Sabogal, 2009) "*The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*" melakukan penelitian etnografi multi-situs di Indonesia selama periode sepuluh tahun. Menggunakan kombinasi metode observasi partisipan, wawancara life history dengan 200 informan, dan analisis arsip kolonial dan kontemporer,

Li mengungkap bagaimana program pembangunan, termasuk CSR, menjadi teknologi kekuasaan yang membentuk cara masyarakat desa diatur dan dikelola. Temuannya menunjukkan empat pola governmentality dalam program pembangunan: *rendering technical*, *depoliticization*, *expert knowledge*, dan *calculated intervention*. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada analisisnya tentang bagaimana intervensi pembangunan membentuk struktur kekuasaan di tingkat desa.

Davidov (2014) dalam "*Discordant Development: Global Capitalism and the Struggle for Connection in Bangladesh*" menggunakan metode etnografi selama dua tahun di komunitas yang terdampak proyek ekstraktif. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 150 informan, observasi partisipan, dan analisis dokumen program CSR. Temuannya mengidentifikasi lima strategi negosiasi yang dikembangkan masyarakat: resistensi terbuka, adaptasi selektif, manipulasi program, mobilisasi jaringan eksternal, dan transformasi institusional. Studi ini memberikan kerangka analitis berharga untuk memahami bagaimana komunitas lokal menegosiasikan posisi mereka dalam struktur kekuasaan yang dibentuk oleh CSR.

Rajak (2011) dalam "*In Good Company: An Anatomy of Corporate Social Responsibility*" melakukan studi etnografi selama 18 bulan di industri pertambangan Afrika Selatan. Metodologi mencakup observasi partisipan di program CSR, wawancara mendalam dengan 180 informan (termasuk eksekutif perusahaan, staf CSR, dan anggota komunitas), serta analisis dokumen perusahaan dan komunitas. Temuannya mengungkap

bagaimana CSR beroperasi sebagai "*moral economy*" yang membentuk relasi kuasa melalui tiga mekanisme: *gift-giving*, *ethical performance*, dan *corporate sovereignty*. Penelitian ini relevan karena memberikan perspektif kritis tentang bagaimana CSR membentuk struktur kekuasaan di tingkat lokal.

Hadiz (2020) dalam "*Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*" menggunakan metode penelitian komparatif-historis dengan melakukan studi kasus di tiga daerah di Indonesia selama periode lima tahun. Metodologi mencakup wawancara mendalam dengan 300 informan, analisis dokumen politik dan kebijakan, serta tracking proses politik lokal. Temuannya mengidentifikasi tiga pola oligarki lokal: *predatory alliance*, *bureaucratic capture*, dan *political-business nexus*. Studi ini relevan karena memberikan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan lokal beroperasi dan bernegosiasi dengan kekuatan eksternal seperti CSR.

Filer & Jenkins (2017) dalam penelitian "*Negotiating Community Support for Closure or Continuation of the Ok Tedi Mine in Papua New Guinea*" menggunakan metode *mixed-method* yang mencakup survei terhadap 900 rumah tangga, 40 wawancara mendalam, dan analisis longitudinal selama lima tahun. Temuannya mengidentifikasi empat strategi negosiasi komunitas: *collective bargaining*, *strategic engagement*, *resistance through adaptation*, dan *institutional innovation*. Penelitian ini sangat relevan karena menunjukkan bagaimana komunitas lokal dapat menjadi agen aktif dalam negosiasi dengan korporasi.

Gabrielson, (2019) dalam " *The Visual Politics of Environmental Justice*" melakukan penelitian aksi partisipatif selama tiga tahun di komunitas yang terdampak program CSR di Indonesia. Metodologi mencakup participatory rural appraisal dengan 500 partisipan, wawancara mendalam dengan 60 informan kunci, dan analisis dokumen program. Temuannya mengungkap lima bentuk *agency* komunitas dalam menghadapi CSR: *institutional bricolage, tactical engagement, strategic resistance, adaptive management, dan transformative participation*. Studi ini relevan karena memberikan pemahaman tentang bagaimana komunitas lokal mengembangkan kapasitas negosiasi dalam menghadapi program CSR.

Tinjauan komprehensif terhadap berbagai literatur di atas mengungkap beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, dalam aspek teoretis, meskipun teori strukturisasi Giddens dan konsep kekuasaan Foucault banyak digunakan dalam studi CSR, masih terdapat kesenjangan dalam integrasi kedua perspektif ini untuk memahami dinamika kekuasaan di tingkat desa. Welker (2014) dan Li, (2016) menggunakan perspektif Foucauldian, sementara Rajak (2011) lebih condong pada teori strukturisasi, namun belum ada studi yang secara komprehensif mengintegrasikan kedua perspektif ini dalam konteks CSR di Indonesia.

Kedua, terdapat keterbatasan dalam teoretisasi tentang bagaimana program CSR membentuk dan dibentuk oleh struktur kekuasaan desa. Studi (Moon et al., 2018) dan (G. Banks et al., 2016) memberikan

kerangka analitis tentang interaksi CSR dengan institusi lokal, tetapi belum secara spesifik menganalisis proses strukturisasi kekuasaan dalam konteks desa di Indonesia. Mayoritas penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan (Gabrielson, 2019) dan (Filer & Jenkins, 2017), menggunakan pendekatan etnografi atau studi kasus tunggal yang memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika strukturisasi kekuasaan yang lebih luas.

Ketiga, dalam aspek metodologis, terdapat kekurangan dalam penggunaan metode yang dapat menangkap proses negosiasi secara real-time. Studi (Hadiz, 2020) dan (Rajak, 2011) lebih berfokus pada analisis retrospektif, sementara proses negosiasi yang sedang berlangsung memerlukan pendekatan metodologis yang berbeda. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dinamika kekuasaan di tingkat desa yang terus berubah, terutama pasca implementasi UU Desa No. 6/2014.

Keempat, dalam konteks Indonesia, studi seperti yang dilakukan (Welker, 2014) dan (Li, 2016) lebih banyak berfokus pada industri ekstraktif. Masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana dinamika kekuasaan terbentuk dalam konteks industri non-ekstraktif. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara memadai menganalisis bagaimana perubahan regulasi desa di Indonesia mempengaruhi strukturisasi kekuasaan dalam implementasi CSR.

Kelima, meskipun (G. Banks et al., 2016) dan (Filer & Jenkins, 2017) mengidentifikasi berbagai strategi negosiasi komunitas, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana strategi-

strategi ini berevolusi dan beradaptasi seiring waktu. Belum ada studi komprehensif yang menganalisis bagaimana program CSR mempengaruhi relasi kuasa antara berbagai kelompok di dalam desa (*elit vs non-elit*, laki-laki vs perempuan, tua vs muda).

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut melalui beberapa kontribusi signifikan. Dalam aspek teoretis, penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif Foucauldian tentang kekuasaan dengan teori strukturisasi (Giddens, 2004) untuk menghasilkan pemahaman yang lebih nuansir tentang bagaimana CSR membentuk dan dibentuk oleh struktur kekuasaan di desa. Studi ini juga akan mengembangkan kerangka teoretis baru untuk memahami proses negosiasi dalam konteks CSR yang mempertimbangkan kompleksitas struktur sosial-politik desa di Indonesia.

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan longitudinal yang memungkinkan analisis real-time terhadap proses strukturisasi kekuasaan dan negosiasi, memberikan pemahaman yang lebih dinamis dibandingkan studi retrospektif. Penggunaan kombinasi metode etnografi institusional dan analisis proses politik akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kekuasaan di tingkat desa.

Fokus pada Desa Juwiring memberikan kesempatan unik untuk menganalisis bagaimana program CSR berinteraksi dengan struktur kekuasaan dalam konteks desa yang telah mengalami transformasi pasca-UU Desa. Penelitian ini akan menghasilkan tipologi baru tentang strategi

negosiasi desa dalam menghadapi program CSR, yang dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan dan praktik CSR di Indonesia.

Secara praktis, temuan penelitian ini akan memberikan panduan bagi implementasi CSR yang lebih sensitif terhadap dinamika kekuasaan lokal dan membantu desa dalam mengembangkan kapasitas negosiasi yang lebih efektif dalam menghadapi program CSR. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengembangan teoretis dalam studi CSR dan kekuasaan, tetapi juga memberikan pemahaman praktis yang bermanfaat bagi implementasi CSR di tingkat desa di Indonesia.

1.6. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis untuk memahami fenomena interdependensi pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui CSR. Teori utama yang digunakan adalah teori interdependensi, didukung oleh teori pemberdayaan masyarakat, teori *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai teori pendukung.

1.6.1. Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa, dan Korporat dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) telah mengalami transformasi konseptual yang signifikan dari sekadar aktivitas filantropi menjadi instrumen kekuasaan yang membentuk relasi sosial-politik di tingkat lokal. Foucault (1982) dalam (Burchell et al., 1991) menjelaskan konsep *governmentality*-nya bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat

represif tetapi juga produktif, membentuk realitas sosial melalui berbagai praktik, wacana, dan institusi. Dalam konteks CSR, perspektif ini membantu memahami bagaimana program-program CSR beroperasi sebagai teknologi kekuasaan yang membentuk cara masyarakat desa dikelola dan diatur.

(Porter & Kramer, 2011) memperkenalkan konsep *Creating Shared value* (CSV) yang memandang CSR bukan sekadar biaya atau tindakan amal, melainkan sebagai investasi sosial yang menciptakan nilai bersama antara korporasi dan komunitas. Namun, (Bansal & Song, 2017) mengkritisi pendekatan ini dengan menunjukkan bahwa penciptaan nilai bersama seringkali melibatkan relasi kekuasaan yang asimetris, di mana korporasi memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan apa yang dianggap sebagai "nilai" dan bagaimana nilai tersebut didistribusikan.

Di Indonesia, kerangka regulasi CSR yang kompleks turut membentuk lanskap institusional di mana relasi kuasa antara berbagai aktor dinegosiasikan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak hanya memberikan legitimasi formal bagi pelaksanaan CSR, tetapi juga menciptakan arena baru bagi kontestasi kekuasaan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan korporat (Rosyida & Suryawati, 2018).

Pemerintah daerah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Smith (2023), merupakan unit administratif yang memiliki otonomi untuk

mengelola sumber daya dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks CSR, peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas koordinasi administratif, tetapi juga melibatkan dimensi politis dalam mengakomodasi berbagai kepentingan dan mengelola relasi kuasa. Hadiz (2020) mengungkapkan bagaimana desentralisasi politik di Indonesia menciptakan konfigurasi kekuasaan baru di tingkat lokal, di mana program CSR menjadi salah satu arena kontestasi antara berbagai kepentingan.

Pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki posisi unik dalam struktur kekuasaan lokal. Antlöv et al., (2016) menjelaskan bahwa desa tidak hanya menjadi unit administratif, tetapi juga merupakan arena sosial-politik di mana berbagai kepentingan dan kekuatan berinteraksi. Dalam konteks CSR, pemerintah desa berperan sebagai mediator sekaligus aktor yang turut membentuk dinamika kekuasaan lokal melalui praktik-praktik *governmentality* (Li, 2016).

Desa, sebagai lokus implementasi CSR, menjadi arena di mana berbagai kepentingan dan relasi kuasa saling berinteraksi. Penelitian (Welker, 2014) di Indonesia menunjukkan bagaimana program CSR tidak hanya berdampak pada aspek sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada rekonfigurasi struktur kekuasaan di tingkat desa. Temuan ini diperkuat oleh (Maconachie, 2014) yang mengungkap bagaimana implementasi CSR melibatkan negosiasi dan kontestasi kepentingan yang kompleks antara berbagai aktor di tingkat desa.

Korporat dalam konteks CSR beroperasi tidak hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif membentuk lanskap sosial-politik lokal. (Rajak, 2011) dalam studinya menunjukkan bagaimana CSR menjadi instrumen bagi korporat untuk membangun legitimasi sosial dan mengamankan kepentingan bisnis melalui pembentukan struktur kekuasaan baru di tingkat lokal. Interaksi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, desa, dan korporat dalam konteks CSR menciptakan apa yang oleh (Giddens, 2004) disebut sebagai dualitas struktur, di mana struktur kekuasaan tidak hanya membatasi tetapi juga memungkinkan tindakan agen sosial. Bebbington et al., (2018) menunjukkan bagaimana program CSR dapat menjadi medium bagi berbagai aktor untuk menegosiasikan kepentingan mereka, sekaligus menjadi arena di mana struktur kekuasaan diproduksi dan direproduksi.

1.6.2. CSR dalam Strukturisasi dan Interelasi Kekuasaan

Untuk memahami bagaimana CSR membentuk dan dibentuk oleh struktur kekuasaan di tingkat desa, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan dinamika kompleks antara struktur dan agen sosial. Dalam konteks ini, teori strukturisasi (Giddens, 2004) memberikan landasan fundamental untuk memahami bagaimana program CSR berperan dalam pembentukan dan reproduksi struktur kekuasaan. Giddens memandang struktur dan agen sebagai dualitas yang tidak terpisahkan, di mana struktur tidak hanya membatasi tetapi juga memungkinkan (*enabling*) tindakan agen sosial (Giddens, 2004). Perspektif ini sangat relevan untuk penelitian ini karena membantu menjelaskan bagaimana

program CSR di Desa Juwiring tidak hanya dibentuk oleh struktur kekuasaan yang ada tetapi juga berperan dalam mereproduksi atau mentransformasi struktur tersebut melalui praktik-praktik sosial yang berulang.

Namun, pemahaman tentang strukturisasi kekuasaan tidak lengkap tanpa mempertimbangkan bagaimana kekuasaan itu sendiri beroperasi dalam praktik sehari-hari. Di sinilah konsep *governmentality* Foucault dalam Burchell et al., (1991) menjadi penting, karena melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif dan tersebar dalam jaringan relasi sosial. Perspektif Foucauldian ini memperkaya analisis dengan menunjukkan bagaimana program CSR beroperasi sebagai teknologi kekuasaan yang membentuk perilaku dan cara berpikir masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh studi empiris (Rajak, 2011) yang mendemonstrasikan bagaimana program CSR menjadi teknologi kekuasaan yang membentuk '*moral economy*' di tingkat lokal.

Dalam konteks Indonesia, perspektif ini mendapat penguatan empiris melalui karya (Li, 2016) yang mengembangkan konsep "*will to improve*". Li menunjukkan bagaimana program pembangunan, termasuk CSR, beroperasi sebagai bentuk *governmental rationality* yang tidak hanya mendistribusikan sumber daya material tetapi juga membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Argumentasi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana program CSR di Desa Juwiring tidak hanya berdampak pada aspek material tetapi juga mengubah lanskap sosial-politik lokal.

Untuk memahami kompleksitas kekuasaan dalam implementasi CSR, kerangka tiga dimensi kekuasaan (Whitt & Lukes, 1980) memberikan alat analitis yang berharga. Dimensi-dimensi ini membantu mengidentifikasi bagaimana kekuasaan beroperasi tidak hanya dalam pengambilan keputusan formal, tetapi juga dalam pembentukan agenda dan preferensi. (Gaventa, 2006) memperkuat kerangka ini dengan konsep "*power cube*" yang membantu menganalisis bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai ruang, level, dan bentuk. Perspektif ini sangat berguna untuk penelitian ini karena membantu mengidentifikasi berbagai manifestasi kekuasaan dalam implementasi CSR di Desa Juwiring.

Studi (Welker, 2014) di Indonesia menambahkan dimensi empiris penting dengan menunjukkan bagaimana program CSR menciptakan "arena negosiasi" di mana berbagai aktor terlibat dalam "permainan kekuasaan". Konsep arena ini diperkaya oleh pemahaman Bourdieu tentang berbagai bentuk kapital yang dimiliki aktor. (Bebbington et al., 2018) memperluas analisis ini dengan menunjukkan bagaimana CSR dapat mengubah distribusi kapital di tingkat lokal. Perspektif ini sangat relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam implementasi CSR di Desa Juwiring.

Untuk memahami bagaimana masyarakat lokal merespons dan menegosiasikan program CSR, konsep "*public transcript*" dan "*hidden transcript*" (Field & Scott, 1994) menjadi sangat relevan. (Gardner, 2000) menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mengembangkan berbagai strategi negosiasi, baik formal maupun informal. Pemahaman ini penting

untuk menganalisis strategi-strategi yang dikembangkan masyarakat Desa Juwiring dalam menghadapi program CSR.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis ini, penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana CSR membentuk dan dibentuk oleh struktur kekuasaan di Desa Juwiring, serta bagaimana berbagai aktor menegosiasikan kepentingan mereka dalam struktur tersebut. Kerangka teoretis ini tidak hanya membantu menjelaskan dinamika kekuasaan yang ada tetapi juga memberikan alat analitis untuk memahami kemungkinan transformasi struktur kekuasaan melalui praktik CSR.

1.6.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Negosiasi di Desa

Dalam menganalisis dinamika kekuasaan di tingkat desa, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan masyarakat dan negosiasi merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. (R. Chambers, 1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dipahami sebagai proses di mana kelompok-kelompok marjinal memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, mengakses sumber daya, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perspektif ini fundamental untuk penelitian ini karena menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar intervensi teknis, melainkan proses transformasi relasi kekuasaan yang melibatkan negosiasi aktif.

Untuk memperdalam pemahaman tentang kompleksitas proses pemberdayaan, (Redclift & Friedmann, 1994) menawarkan kerangka

analitis yang membagi pemberdayaan ke dalam tiga dimensi kekuasaan: sosial, politik, dan psikologis. Kerangka ini sangat relevan untuk penelitian di Desa Juwiring karena membantu mengidentifikasi berbagai arena di mana negosiasi kekuasaan berlangsung. Dimensi-dimensi ini tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling mempengaruhi dan membentuk kapasitas masyarakat dalam melakukan negosiasi.

Argumentasi ini diperkuat oleh (Hikey & Mohan, 2004) yang menekankan aspek politik dari pemberdayaan. Kontribusi mereka penting karena menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kontestasi dan negosiasi kekuasaan. Dalam konteks Desa Juwiring, perspektif ini membantu memahami mengapa program pemberdayaan yang mengabaikan dimensi politik dan negosiasi seringkali gagal mencapai tujuannya.

Pemahaman tentang ruang-ruang di mana negosiasi berlangsung diperkaya oleh (Cornwall, 2008) melalui konsep "ruang partisipasi". Perbedaan antara "*invited spaces*" dan "*claimed spaces*" sangat relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Desa Juwiring bernegosiasi dalam program CSR. (Gaventa, 2006) memperkuat kerangka ini dengan "*power cube*" yang membantu memetakan dinamika kekuasaan dalam ruang-ruang partisipasi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, kontribusi (Antlöv, 2003) tentang reformasi politik di tingkat desa memberikan pemahaman kontekstual yang penting. Temuannya bahwa proses negosiasi masih dipengaruhi oleh

pola-pola kekuasaan tradisional sangat relevan untuk memahami dinamika pemberdayaan di Desa Juwiring. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan warisan historis dan kultural dalam analisis proses pemberdayaan dan negosiasi.

Li (2016) memperkaya pemahaman ini dengan konsep "*practices of assemblage*" yang menunjukkan kompleksitas negosiasi dalam program pemberdayaan. Perspektifnya penting untuk penelitian ini karena membantu mengidentifikasi berbagai aktor, kepentingan, dan bentuk pengetahuan yang terlibat dalam proses pemberdayaan di Desa Juwiring.

Cleaver (2012) memberikan alat analitis yang berguna melalui konsep "*institutional bricolage*". Konsep ini membantu memahami bagaimana masyarakat Desa Juwiring mengkombinasikan berbagai sumber daya dan praktik dalam strategi negosiasi mereka. Perspektif ini memperkaya analisis dengan menunjukkan kreativitas dan agency masyarakat dalam menghadapi program pemberdayaan. Dimensi kultural dalam proses negosiasi mendapat perhatian khusus dari Rao & Walton (2004) melalui konsep "*cultural agency*". Pemahaman ini penting karena menunjukkan bagaimana kapasitas negosiasi masyarakat Desa Juwiring tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan praktik budaya lokal.

(Williams, 2004) memperkuat kerangka analitis ini dengan konsep "*political capabilities*". Perspektifnya relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Juwiring mengembangkan kapasitas politik dalam menghadapi program pemberdayaan. Ini menunjukkan bahwa

pemberdayaan yang efektif membutuhkan pengembangan kemampuan politik kolektif. N. Banks et al., (2015) memberikan kontribusi penting dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam pengembangan kapasitas negosiasi kolektif. Kerangka mereka membantu menganalisis bagaimana masyarakat Desa Juwiring membangun dan menggunakan kapasitas negosiasi dalam konteks program CSR.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis ini, penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana proses pemberdayaan dan negosiasi di Desa Juwiring saling terkait dan membentuk dinamika kekuasaan lokal. Kerangka teoretis ini tidak hanya membantu menjelaskan proses yang ada tetapi juga memberikan alat analitis untuk memahami potensi transformasi relasi kekuasaan melalui pemberdayaan dan negosiasi.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.7.1. Operasionalisasi Konsep

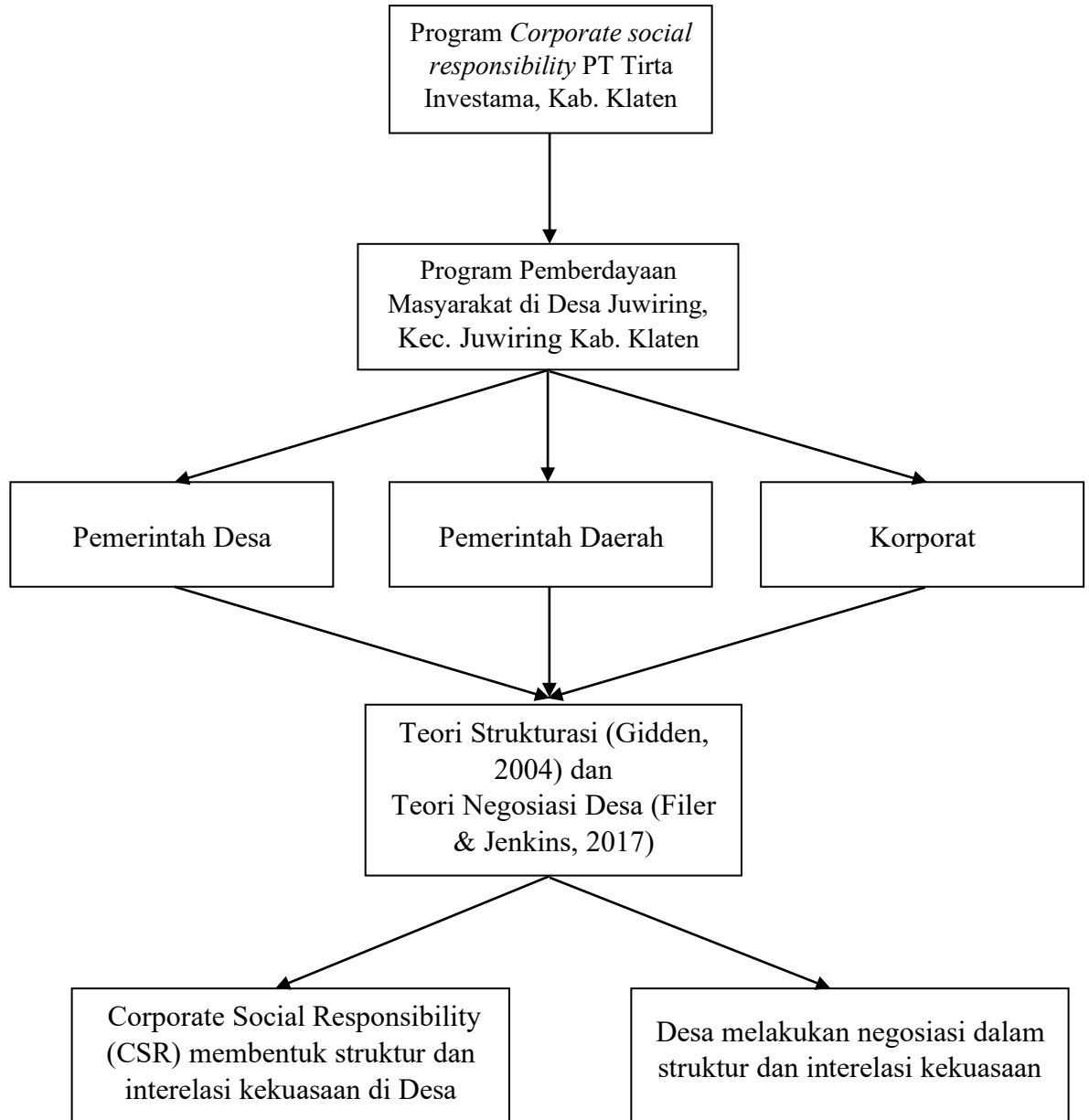
Teori/Konsep	Definisi	Dimensi	Indikator	Sumber
Pemberdayaan Masyarakat	Proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka melalui partisipasi dengan orang lain untuk mencapai perubahan di lingkungan sosial dan politik mereka	Partisipasi, Pengembangan Kapasitas, Mobilisasi Sosial	a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan b. Peningkatan kapasitas dan keterampilan c. Akses terhadap sumber daya d. Penguatan organisasi lokal e. Jaringan sosial	Zimmerman (2000) <i>"Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis"</i>
<i>Corporate social responsibility (CSR)</i>	Tanggung jawab moral dan sosial perusahaan yang mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis	Ekonomi, Hukum, Etika, Filantropi	a. Profitabilitas bisnis b. Kepatuhan hukum c. Standar etika dan moral d. Kontribusi sukarela e. Program pengembangan masyarakat	Carroll (2016) <i>"Carroll's pyramid of CSR: taking another look"</i>
Strukturisasi Kekuasaan	Proses dimana struktur dan praktik sosial saling membentuk dan mereproduksi relasi kekuasaan melalui interaksi antara CSR dan desa	1. Dualitas Struktur	a. Aturan formal dan informal dalam pelaksanaan CSR di desa b. Pola hubungan antara korporat dan pemerintah desa c. Mekanisme pengambilan keputusan program CSR	Giddens, A. (2004). <i>The constitution of society: Outline of the theory of structuration: Elements of the theory of structuration. In Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic</i>
		2. Agensi dan Kekuasaan	a. Kapasitas aktor desa mempengaruhi alur program CSR b. Transformasi sumber daya menjadi kekuasaan c. Kausalitas dan intensionalitas dalam tindakan aktor	
		3. Rutinisasi dan Praktik Sosial	a. Praktik sosial sehari-hari terkait program CSR b. Regionalisasi praktik dalam ruang dan waktu c. Reproduksi praktik sosial melalui program	

		4. Refleksivitas	a. Kesadaran diskursif aktor desa b. Kesadaran praktis dalam pelaksanaan program c. Monitoring refleksif tindakan kolektif	Turn.
		5. Integrasi Sosial dan Sistem	a. Integrasi sosial dalam implementasi CSR b. Integrasi sistem dalam struktur program CSR c. Mekanisme penyebaran praktik CSR	
Negosiasi Desa	Proses desa memperjuangkan kepentingannya dalam struktur program CSR	1. Dukungan Masyarakat	a. Pembentukan konsensus internal desa b. Mobilisasi dukungan berbasis komunitas c. Mekanisme legitimasi representasi	Filer, C., & Carr (Jenkins), P. (2017). <i>Negotiating Community Support for Closure or Continuation of the Ok Tedi Mine in Papua New Guinea</i> . In C. F. P.-Y. L. M. (Ed.), <i>Large-scale Mines and Local-level Politics Between New Caledonia and Papua New Guinea</i> (1 ed., Vol. 1, pp. 229-260). ANU Press.
		2. Negosiasi Pemangku Kepentingan	a. Identifikasi dan pengelolaan kepentingan b. Taktik dan strategi negosiasi c. Formasi aliansi strategis	
		3. Dampak Lingkungan	a. Artikulasi isu lingkungan dalam negosiasi b. Posisi tawar berbasis potensi dampak c. Monitoring dampak sebagai mekanisme kontrol	
		4. Kompensasi Komunitas Lokal	a. Penetapan nilai dan bentuk kompensasi b. Distribusi manfaat kompensasi c. Keberlanjutan skema kompensasi	
		5. Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Program	a. Pengembangan alternatif ekonomi b. Perencanaan jangka panjang c. Pengembangan kapasitas lokal	

Sumber: diolah oleh peneliti.

1.8. Kerangka Berpikir

Bagan 1.8.1. Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh peneliti.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mengkaji bagaimana CSR membentuk struktur dan

interelasi kekuasaan di desa, serta bagaimana desa melakukan negosiasi dalam struktur kekuasaan tersebut. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada argumen (Flick, 2022) bahwa penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana makna sosial dikonstruksi dan bagaimana relasi kekuasaan beroperasi dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi nuansa dan kompleksitas dari proses strukturisasi kekuasaan dan dinamika negosiasi yang terjadi antara desa dan program CSR.

Strategi studi kasus dipilih karena, seperti yang dikemukakan oleh (Yin, 2018), pendekatan ini sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dalam konteks fenomena kontemporer di mana peneliti memiliki kontrol yang terbatas. Studi kasus memungkinkan penelitian ini untuk menggali secara mendalam bagaimana struktur kekuasaan terbentuk melalui program CSR dan bagaimana desa melakukan negosiasi dalam struktur tersebut, dengan mempertimbangkan konteks spesifik Desa Juwiring.

Lebih spesifik, penelitian ini menggunakan tipe studi kasus instrumental sebagaimana didefinisikan oleh (Johnson & Stake, 1996), di mana kasus tertentu - dalam hal ini Desa Juwiring - diteliti untuk memberikan pemahaman tentang isu yang lebih luas, yaitu strukturisasi kekuasaan dan negosiasi dalam konteks CSR di tingkat desa. Pilihan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan wawasan yang dapat berkontribusi pada pemahaman teoretis yang lebih luas tentang dinamika kekuasaan dalam implementasi CSR.

(Creswell, 2003) menekankan bahwa penelitian kualitatif cocok untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok pada fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana berbagai aktor di desa memaknai dan merespons struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR, serta bagaimana mereka mengembangkan dan mengimplementasikan strategi negosiasi.

Dengan mengintegrasikan perspektif etnografi institusional yang dikembangkan oleh (Smith, 2023), penelitian ini juga memperhatikan bagaimana praktik-praktik keseharian dan relasi sosial terorganisir melalui dan dipengaruhi oleh kekuatan institusional yang lebih luas. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana program CSR sebagai kekuatan institusional membentuk dan dibentuk oleh praktik-praktik sosial di tingkat desa.

Pemilihan tipe penelitian ini juga mempertimbangkan kompleksitas dari fenomena yang diteliti. Seperti yang diargumentasikan oleh (Creswell, 2003), studi kasus kualitatif memungkinkan pemahaman kontekstual yang kaya dan nuansir tentang fenomena sosial yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana struktur kekuasaan terbentuk dan bagaimana proses negosiasi berlangsung dalam konteks spesifik program CSR di Desa Juwiring.

1.9.2. Ruang lingkup

Penelitian ini mencakup analisis terhadap strukturisasi kekuasaan dan proses negosiasi dalam konteks program CSR di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Untuk memastikan ketajaman analisis, ruang lingkup penelitian dibatasi dalam beberapa aspek:

1. Batasan Temporal

- a. Penelitian mencakup tahun 2018-2023, memberikan rentang waktu yang memadai untuk menganalisis proses strukturisasi kekuasaan dan dinamika negosiasi yang berlangsung.
- b. Pemilihan periode ini mempertimbangkan dimulainya program CSR PT Tirta Investama yang intensif di Desa Juwiring dan perkembangan signifikannya hingga saat ini.

2. Batasan Spasial

- a. Secara geografis, penelitian dibatasi pada wilayah administratif Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.
- b. Fokus pada lokasi ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana struktur kekuasaan terbentuk dan dinegosiasikan dalam konteks spesifik satu desa.

3. Batasan Substantif Penelitian akan berfokus pada tiga aspek utama:

- a. Proses strukturisasi kekuasaan melalui program CSR, meliputi:
 - i. Mekanisme pembentukan struktur kekuasaan
 - ii. Interelasi antar aktor dalam struktur tersebut

- iii. Dampak struktur kekuasaan terhadap tata kelola desa
 - b. Praktik negosiasi yang dilakukan desa, mencakup:
 - i. Strategi negosiasi yang dikembangkan
 - ii. Arena-arena di mana negosiasi berlangsung
 - iii. Hasil-hasil dari proses negosiasi
 - c. Dinamika relasi kekuasaan, meliputi:
 - i. Pola-pola relasi antara desa dan korporat
 - ii. Transformasi struktur kekuasaan lokal
 - iii. Implikasi terhadap tata kelola program CSR
- 4. Batasan Aktor Penelitian akan melibatkan aktor-aktor kunci berikut:
 - a. Pemerintah desa dan perangkatnya
 - b. Perwakilan PT Tirta Investama
 - c. Tokoh masyarakat dan kelompok kepentingan di desa
 - d. Penerima manfaat program CSR
 - e. Pemerintah daerah (khususnya yang terkait dengan koordinasi CSR)
- 5. Batasan Program Fokus penelitian adalah pada program CSR PT Tirta Investama di Desa Juwiring, dengan penekanan pada:
 - a. Program pemberdayaan masyarakat

- b. Inisiatif pengembangan komunitas
- c. Program-program yang melibatkan negosiasi intensif antara desa dan korporat

Penetapan ruang lingkup ini mengacu pada argumentasi (Yin, 2018) tentang pentingnya batasan yang jelas dalam studi kasus untuk memastikan kedalaman analisis. Seperti yang dikemukakan oleh Johnson & Stake (1996), batasan yang tepat memungkinkan penelitian kualitatif untuk menggali secara mendalam fenomena yang diteliti sambil tetap mempertahankan fokus analitis yang jelas.

1.9.3. Fenomena Penelitian

Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah strukturisasi kekuasaan dan proses negosiasi yang terjadi dalam implementasi program CSR di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan kompleksitas relasi kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR, di mana berbagai aktor terlibat dalam proses pembentukan dan negosiasi struktur kekuasaan (Welker, 2014). Di balik niat baik program pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen strategis perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial, terdapat dinamika kekuasaan yang kompleks antara korporasi, pemerintah desa, dan masyarakat lokal.

Program CSR PT Tirta Investama di Desa Juwiring telah menciptakan arena baru bagi pembentukan dan negosiasi struktur kekuasaan. Sebagaimana diargumentasikan Rajak (2011), program CSR

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai teknologi kekuasaan yang membentuk cara masyarakat desa diatur dan dikelola. Hal ini terlihat dari bagaimana program CSR mempengaruhi proses pengambilan keputusan di desa, pola distribusi sumber daya, dan dinamika relasi antar aktor.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada periode Maret-April 2024 dan Oktober 2024, teridentifikasi beberapa manifestasi fenomena strukturisasi kekuasaan dan negosiasi di Desa Juwiring. Program CSR telah menciptakan mekanisme koordinasi formal dan informal yang intensif antara pemerintah desa dan korporasi, yang tercermin dalam pertemuan rutin dan pembentukan forum-forum koordinasi khusus. Pola interaksi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Li (2016), mencerminkan bagaimana program pembangunan dapat menjadi medium bagi pembentukan dan reproduksi struktur kekuasaan di tingkat lokal.

Fenomena negosiasi terlihat dari bagaimana desa mengembangkan berbagai strategi untuk mempengaruhi arah dan implementasi program CSR. Mengacu pada konsep "*weapons of the weak*" yang dikemukakan (Bailey & Scott, 1987), masyarakat desa tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi struktur kekuasaan yang terbentuk melalui CSR. Mereka mengembangkan berbagai bentuk negosiasi, baik formal maupun informal, untuk mempertahankan kepentingan mereka. (G. Banks et al., 2016) dalam studinya mengidentifikasi berbagai strategi negosiasi yang dikembangkan komunitas lokal, mulai dari resistensi halus hingga adaptasi strategis.

Dinamika strukturisasi kekuasaan dan negosiasi ini semakin kompleks dengan hadirnya peran Bapperida Kabupaten Klaten sebagai koordinator program CSR di tingkat kabupaten. (Hadiz, 2020) menunjukkan bagaimana desentralisasi di Indonesia telah menciptakan konfigurasi kekuasaan baru di tingkat lokal, di mana berbagai aktor berkompetisi dan bernegosiasi untuk mempengaruhi alokasi sumber daya pembangunan. Dalam konteks Desa Juwiring, koordinasi multi-level antara Bappedalitbang, pemerintah desa, dan PT Tirta Investama menciptakan arena negosiasi yang kompleks di mana struktur kekuasaan terus-menerus dibentuk dan dinegosiasikan.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memahami kompleksitas strukturisasi kekuasaan dan proses negosiasi dalam implementasi CSR di Desa Juwiring. Sebagaimana diargumentasikan Yin (2018), penggunaan berbagai sumber data dalam studi kasus memungkinkan triangulasi yang memperkuat validitas temuan penelitian. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan para aktor yang terlibat dalam struktur kekuasaan dan proses negosiasi, sementara data sekunder memberikan konteks historis dan institusional yang diperlukan untuk memahami dinamika kekuasaan yang ada.

Data primer akan dikumpulkan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci yang merepresentasikan berbagai posisi dalam struktur kekuasaan, termasuk

perwakilan PT Tirta Investama, pejabat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat program CSR. Sebagaimana dijelaskan Creswell (2003), wawancara mendalam memungkinkan peneliti mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas dari pengalaman dan perspektif informan. Kedua, observasi partisipan terhadap berbagai forum dan proses di mana negosiasi kekuasaan berlangsung, seperti pertemuan koordinasi program CSR, musyawarah desa, dan implementasi program di lapangan. Ketiga, dokumentasi visual berupa foto dan video yang merekam interaksi antar aktor dan manifestasi fisik dari program CSR.

Data sekunder akan diperoleh dari berbagai dokumen yang mencerminkan struktur dan dinamika kekuasaan dalam implementasi CSR. Mengacu pada argumentasi Flick (2022), dokumen tidak hanya menyajikan informasi faktual tetapi juga merepresentasikan bagaimana kekuasaan dilegitimasi dan direproduksi melalui praktik dokumentasi. Dokumen yang akan dianalisis meliputi:

- (a) dokumen perencanaan dan laporan program CSR PT Tirta Investama;
- (b) dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes dan RKPDes;
- (c) notulensi rapat dan kesepakatan-kesepakatan tertulis antara desa dan korporasi;
- (d) peraturan dan kebijakan terkait CSR di tingkat desa dan kabupaten;
- (e) dokumentasi media lokal tentang implementasi program CSR.

Pemilihan dan penggunaan data dalam penelitian ini akan mengikuti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh (Ridder et al., 2014) tentang pentingnya data yang kaya (*rich data*) untuk memahami kompleksitas fenomena sosial. Triangulasi data akan dilakukan tidak hanya untuk memverifikasi temuan tetapi juga untuk memahami bagaimana berbagai perspektif dan interpretasi tentang kekuasaan dan negosiasi berinteraksi dalam konteks program CSR di Desa Juwiring. Sebagaimana ditekankan oleh (TRacy, 2020), kualitas data dalam penelitian kualitatif tidak hanya ditentukan oleh kuantitas tetapi juga oleh kemampuannya untuk menangkap kompleksitas dan nuansa dari fenomena yang diteliti.

1.9.5. Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan, dengan fokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam strukturisasi kekuasaan dan proses negosiasi dalam implementasi CSR di Desa Juwiring. Sebagaimana dikemukakan oleh (Patton, 2014), *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memilih kasus-kasus yang kaya informasi (*information-rich cases*) yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pemilihan informan didasarkan pada posisi dan peran mereka dalam struktur kekuasaan, serta keterlibatan mereka dalam proses negosiasi program CSR.

Mengacu pada kerangka analitis yang dikembangkan (Gaventa, 2006) tentang dimensi kekuasaan, informan dipilih untuk

merepresentasikan berbagai level dan arena di mana kekuasaan beroperasi. Informan utama dari unsur pemerintah desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan, dan perangkat desa yang secara langsung terlibat dalam program CSR. Dari sisi korporasi, informan mencakup Manajer CSR PT Tirta Investama. Sebagaimana diargumentasikan Li (2016), pemahaman tentang dinamika kekuasaan memerlukan perspektif dari berbagai aktor yang terlibat dalam "*practices of government*".

Untuk memahami dinamika negosiasi di tingkat grassroots, penelitian ini juga akan melibatkan tokoh masyarakat dan penerima manfaat program CSR sebagai informan. Cornwall (2008) menekankan pentingnya memahami bagaimana kekuasaan dinegosiasikan tidak hanya dalam ruang-ruang formal tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, informan akan dipilih untuk merepresentasikan berbagai kelompok kepentingan di desa, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku usaha mikro yang terdampak program CSR. Keberagaman informan ini penting untuk memahami bagaimana berbagai aktor memaknai dan merespons struktur kekuasaan yang ada.

Kriteria pemilihan informan meliputi:

1. Pemerintah Desa:

- a. Kepala Desa Juwiring (1 Orang)
- b. Sekretaris Desa (1 Orang)
- c. Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan (1 Orang)

2. Pemerintah Daerah:

- a. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPEDDALITBANG) (1 Orang)
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) (1 Orang)

3. PT Tirta Investama:

- a. Manajer program CSR (1 Orang)

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

- a. LSM terlibat pada program CSR di Desa Juwiring (1 Orang)

5. Tokoh Masyarakat:

- a. Tokoh agama atau adat yang berpengaruh di desa (1 Orang)
- b. Ketua organisasi masyarakat atau kelompok kepentingan di desa (2 Orang)

6. Warga Desa:

- a. Penerima manfaat langsung dari program pemberdayaan masyarakat (1 Orang)
- b. Warga yang tidak terlibat langsung dalam program (sebagai pembanding) (1 Orang)

Jumlah informan akan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data sebagaimana dijelaskan oleh Guest et al., (2006), di mana pengumpulan

data akan dihentikan ketika tidak ada lagi tema atau insight baru yang muncul dari wawancara tambahan. Berdasarkan studi pendahuluan dan literatur terkait, dibutuhkan total 12 informan untuk mencapai saturasi data. Selain pertimbangan saturasi, pemilihan informan juga akan memperhatikan aspek representasi gender dan kelompok usia untuk memastikan keragaman perspektif dalam analisis strukturisasi kekuasaan dan proses negosiasi.

1.9.6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Namun, untuk membantu proses pengumpulan data yang sistematis dan komprehensif, beberapa instrumen pendukung akan digunakan:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara semi-terstruktur akan dikembangkan untuk setiap kategori informan (perwakilan korporat, pejabat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga desa). Pedoman ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan kunci yang relevan dengan tujuan penelitian, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama wawancara (Moleong, 2007).

2. Catatan Lapangan

Buku catatan atau perangkat elektronik akan digunakan untuk mencatat refleksi, insight, dan temuan-temuan penting selama proses penelitian. Catatan lapangan ini akan membantu peneliti dalam menganalisis data dan mengembangkan interpretasi (Sugiyono, 2019).

3. Alat Perekam Audio

Dengan izin informan, wawancara akan direkam menggunakan alat perekam audio untuk memastikan akurasi data dan memfasilitasi analisis yang lebih mendalam (Moleong, 2007).

4. Daftar Cek Dokumen:

Daftar ini akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan mengorganisir dokumen-dokumen sekunder yang relevan dengan penelitian (Bungin, 2007).

Semua instrumen ini akan diuji coba dan divalidasi sebelum digunakan dalam penelitian lapangan. Validasi dapat dilakukan melalui konsultasi dengan ahli metodologi penelitian dan uji coba pada kelompok kecil yang memiliki karakteristik serupa dengan informan penelitian (Creswell, 2003). Penggunaan berbagai instrumen ini bertujuan untuk memastikan pengumpulan data yang sistematis dan komprehensif, sekaligus memfasilitasi triangulasi data untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Creswell, 2003).

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data akan digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Teknik-teknik tersebut meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail dan fleksibel, serta mengeksplorasi perspektif dan pengalaman informan terkait program CSR dan dinamika politik lokal (Sugiyono, 2019).

2. Analisis Dokumen

Dokumen-dokumen relevan seperti laporan CSR, dokumen perencanaan desa, dan publikasi media akan dianalisis untuk memperoleh informasi tambahan dan memverifikasi data dari sumber lain. Analisis dokumen juga dapat memberikan perspektif historis tentang perkembangan program CSR di desa (Moleong, 2007).

3. Photovoice

Teknik ini melibatkan partisipan dalam mendokumentasikan dan merefleksikan realitas komunitas mereka melalui foto. Photovoice dapat memberikan perspektif unik tentang dampak

program CSR dari sudut pandang masyarakat (Moleong, 2007).

4. Pengamatan Lapangan

Kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi program CSR akan dilakukan untuk mengamati secara langsung implementasi dan dampak program tersebut (Bungin, 2007).

Dalam pelaksanaannya, teknik-teknik pengumpulan data ini akan digunakan secara fleksibel dan iteratif, disesuaikan dengan perkembangan temuan di lapangan. Triangulasi data dari berbagai sumber dan metode akan dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Creswell, 2003)

Selama proses pengumpulan data, peneliti akan memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informan, memperoleh persetujuan untuk perekaman atau pengambilan gambar, dan menghormati norma-norma lokal (Herdiansyah, 2015).

1.9.8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola (tema) dalam data (Creswell, 2003). Proses analisis data akan dilakukan secara iteratif dan berlangsung selama proses pengumpulan data hingga penulisan laporan. Berikut adalah tahapan analisis data yang akan dilakukan:

1. Transkripsi dan Organisasi Data

Semua data wawancara akan ditranskripsikan, catatan lapangan akan diketik ulang, dan dokumen-dokumen akan diorganisir. Data akan dikelompokkan berdasarkan sumber dan jenis informasi (Moleong, 2007).

2. Koding Data

Data akan dikoding untuk mengidentifikasi unit-unit bermakna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Koding akan dilakukan secara manual (Ridder et al., 2014)

3. Pengembangan Tema

Kode-kode yang telah diidentifikasi akan dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas. Tema-tema ini akan mencerminkan pola-pola penting dalam data yang berkaitan dengan fenomena intervensi korporat dalam politik CSR (Afrizal, 2014).

4. Analisis Komparatif

Perbandingan akan dilakukan antara berbagai sumber data dan perspektif informan untuk mengidentifikasi pola-pola, persamaan, dan perbedaan dalam data (Creswell, 2003).

5. Interpretasi Data

Tema-tema yang muncul akan diinterpretasikan dalam konteks kerangka teoretis penelitian, khususnya teori intervensi politik korporat, CSR, dan pemberdayaan masyarakat (Bungin, 2007).

6. Validasi Temuan

Temuan awal akan divalidasi melalui triangulasi data, member checking dengan informan kunci, dan diskusi dengan rekan peneliti (Sugiyono, 2019).

7. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis akan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Ridder et al., 2014)

8. Penyajian Data

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi, disertai dengan kutipan langsung dari informan, diagram, dan tabel untuk mendukung temuan (Creswell, 2003).

Dalam proses analisis, peneliti akan menggunakan teknik "thick description" untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang konteks dan makna dari fenomena interdependensi pemerintah desa yang diteliti (Freeman, 2014). Selain itu, peneliti akan melakukan refleksi kritis terhadap posisi dan asumsi pribadi yang mungkin mempengaruhi interpretasi data.